

**RENCANA KERJA ( RENJA )  
KECAMATAN DLANGGU KABUPATEN MOJOKERTO  
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO  
KECAMATAN DLANGGU  
TAHUN 2021**

## KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT, marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini.

Sebagai tindaklanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut di atas, kami telah berusaha menyajikan Rencana Kerja (RENJA) Kantor Kecamatan Dlanggu Tahun Anggaran 2022. Rencana Kerja (RENJA) Kantor Kecamatan Dlanggu Tahun 2022 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 ini dan semoga Allah SWT. senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, September 2021



SAMAT DLANGGU

**NUNUK DJATMIKO, S.Sos. M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 196907011989031008

## DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii
BAB I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	4
BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu .....	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan Capaian Renstra PD.....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	19
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	21
2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD.....	22
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	29
BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah .....	33
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	33
3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah .....	33
3.3 Program dan Kegiatan .....	34
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah .....	40
BAB V Penutup .....	47
LAMPIRAN	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Rencana Kerja Tahun 2022 Kecamatan Dlanggu merupakan dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2022 Kabupaten Mojokerto yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Mojokerto berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

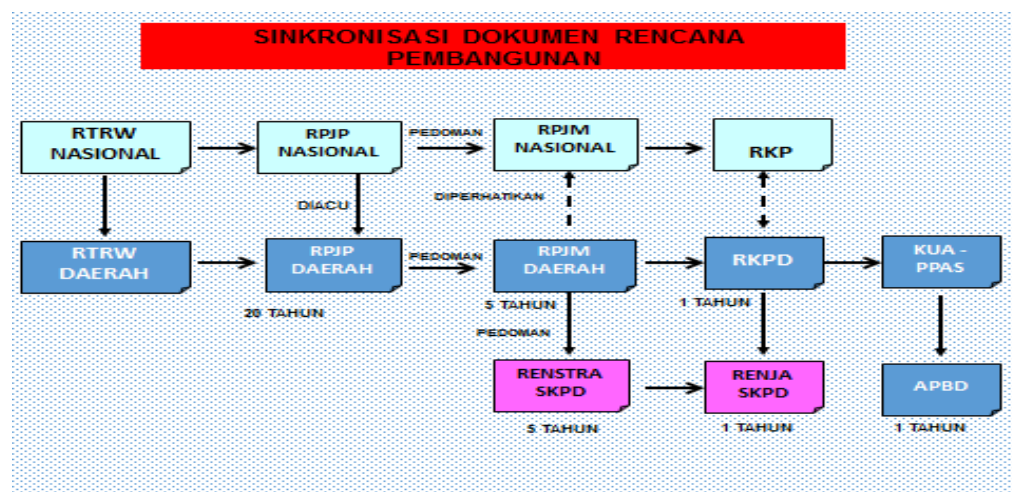
Rencana Kerja Tahun 2022 Kecamatan Dlanggu yang selanjutnya disingkat dengan Renja Kecamatan Dlanggu adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Dlanggu Tahun 2021 – 2026.

Adapun proses penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi persiapan penyusunan Renja, penyusunan rancangan awal Renja, penyusunan rancangan Renja, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renja dan penetapan Renja.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1

Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renja Kecamatan Dlanggu yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Mojokerto dan kemudian menjadi pedoman penyusunan RKA Kecamatan Dlanggu.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
14. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2005 – 2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
27. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;
28. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
29. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak ( Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4 );
30. Peraturan daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1 );
31. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026;
32. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
33. Surat Keputusan Camat Dlanggu Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tim Penyusunan Renstra Kecamatan Dlanggu 2021-2026

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2022 Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto adalah sebagai arah dan pedoman bagi upaya penjabaran penyelenggaraan perencanaan pembangunan dalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, sehingga para pelaksana pembangunan daerah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pembangunan daerah.

Adapun tujuannya adalah agar pembanguann di Kabupaten Mojokerto khususnya di Kecamatan Dlanggu sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan dilakukan secara terukur, terarah dan terpadu secara konsisten, agar berhasil sesuai dengan visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Tahun 2022 Kecamatan Dlanggu ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Dlanggu. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renja ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Sistematika penulisan Rencana Kerja Tahun 2022 Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

### **Bab I Pendahuluan**

Memuat tentang Renja Perangkat Daerah serta keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

#### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Dlanggu, proses penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Dlanggu, keterkaitan antara Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Dlanggu dengan Rancangan Awal RKPD dan Renstra Kecamatan Dlanggu.

#### **1.2. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

#### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Dlanggu

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

## **Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan sebagai landasan menyusun indikasi rencana program lima dan satu tahunan.

### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Sajian Tabel TC-29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan.

### **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Sajian Tabel TC-30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Berisikan uraian mengenai Isu-isu penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Dlanggu yang dipengaruhi oleh Kondisi Internal dan Eksternal, sehingga dapat diketahui tentang Kekuatan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi sehingga berpeluang dalam meningkatkan Pelayanan Publik Kecamatan Dlanggu.

#### 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan ;

#### 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan uraian mengenai proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;

### **BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

Berisi tentang perumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah

#### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi.

#### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Pada Bab ini berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas Renstra Kecamatan Daerah sehingga tujuan dan sasaran Perangkat Daerah telah sesuai dengan tujuan Kabupaten Mojokerto.

#### 3.3 Program dan Kegiatan

Berisi penjelasan mengenai rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2022 yang mengacu pada Renstra Kecamatan Dlanggu, dan perkiraan maju tahun 2023.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain :

- Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan
- Lokasi program/kegiatan
- Total kebutuhan dana / pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

### **Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Bab ini menjelaskan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

## **Bab V PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan secara singkat dari Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) dari Bab 1 – Bab 4.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Dlanggu tahun lalu dapat dikatakan sudah sangat tinggi dengan target kinerja dapat tercapai 100% dan realisasi anggaran mencapai 100%, hal ini menunjukkan bahwa apa yang telah direncanakan dipastikan mendapatkan pendanaan dan dilaksanakan, namun demikian tetap menyesuaikan dengan prioritas dan kemampuan daerah. Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto tahun lalu disajikan dalam tabel sebagai berikut;

**TABEL 2.1 (T-C. 29)**

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan  
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021  
Kabupaten Mojokerto**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Dlanggu

Lembar : ...

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n- 1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	<b>Unsur Kewilayahan</b>									
7.01	<b>Kecamatan</b>									
7.01.01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Indeks Kepuasan ASN terhadap layanan Kesekretariatan</b>	<b>85</b>	<b>n/a</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>100%</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>100%</b>
7.01.01.2.01	<b>Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kecamatan yang</b>	<b>140 dokumen</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>18 dokumen</b>	<b>18 dokumen</b>	<b>100%</b>

		<b>dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku tepat waktu</b>								
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun	60 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	3 dokumen	3 dokumen	100%
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun	80 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	15 dokumen	15 dokumen	100%
7.01.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan keuangan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku tepat waktu</b>	<b>350 laporan</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>13 laporan</b>	<b>13 laporan</b>	<b>100%</b>
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	70 bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	14 bulan	14 bulan	100%
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan keuangan bulanan dan tahunan	85 laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	13 laporan	13 laporan	100%
7.01.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah pakaian dinas PNS serta perlengkapannya yang dapat terpenuhi</b>	<b>135 stel</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>20 stel</b>	<b>20 stel</b>	<b>100%</b>
7.01.01.2.05.02	Pangadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas PNS dan kelengkapannya yang dapat terpenuhi	135 stel	n/a	n/a	n/a	n/a	20 stel	20 stel	100%
7.01.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan</b>	<b>100%</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

		<b>administrasi umum perkantoran</b>								
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 paket	n/a	n/a	n/a	n/a	1 paket	1 paket	1 paket
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan : Laptop, PC, Lcd, Printer, dll.	5 paket	n/a	n/a	n/a	n/a	1 paket	1 paket	1 paket
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu pemenuhan logistik kantor	60 bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	12 bulan	12 bulan	12 bulan
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi	5 paket	n/a	n/a	n/a	n/a	1 paket	1 paket	1 paket
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah waktu pemenuhan bahan bacaan	60 bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah waktu pemenuhan biaya perjalanan dinas	60 bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	12 bulan	12 bulan	12 bulan
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu pemenuhan biaya perjalanan dinas	60 bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	12 bulan	12 bulan	12 bulan
7.01.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang kantor</b>	<b>100%</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

7.01. 01.2. 08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	12 bulan	12 bulan	12 bulan
7.01. 01.2. 08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu pemenuhan biaya perjalanan dinas	2 orang	n/a	n/a	n/a	n/a	2 orang	2 orang	2 orang
7.01. 01.2. 09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>100%</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
7.01. 01.2. 09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara selama setahun	2 unit	n/a	n/a	n/a	n/a	2 unit	2 unit	2 unit
7.01. 01.2. 09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	2 unit	n/a	n/a	n/a	n/a	2 unit	2 unit	2 unit
7.01. 01.2. 09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara dengan baik	5 paket	n/a	n/a	n/a	n/a	1 paket	1 paket	1 paket
7.01. 02	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	<b>Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan</b>	<b>81%</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>81%</b>	<b>81%</b>	<b>81%</b>

7.01. 02.2. 04	<b>Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Jumlah Pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan minimal</b>	<b>560 pelayanan</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>560 pelayanan</b>	<b>560 pelayanan</b>	<b>100%</b>
7.01. 02.2. 04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelayanan Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	30 pelayanan	n/a	n/a	n/a	n/a	30 pelayanan	30 pelayanan	100%
7.01. 02.2. 04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah Pelayanan Non Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	530 pelayanan	n/a	n/a	n/a	n/a	530 pelayanan	530 pelayanan	100%
7.01. 03	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat</b>	<b>81%</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>81%</b>	<b>81%</b>	<b>100%</b>
7.01. 03.2. 01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Jumlah Koordinas pemberdayaan desa</b>	<b>24 Kegiatan</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>24 kegiatan</b>	<b>24 kegiatan</b>	<b>100%</b>
7.01. 03.2. 01.02	Singkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh	Jumlah Kegiatan pemberdayaan masyarakat	12 kegiatan	n/a	n/a	n/a	n/a	12 kegiatan	12 kegiatan	n/a

	pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan									
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat	12 Kegiatan	n/a	n/a	n/a	n/a	12 kegiatan	12 kegiatan	100%
7.01.04	<b>Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>81%</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>81%</b>	<b>81%</b>	<b>81%</b>
7.01.04.2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Jumlah waktu Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman</b>	<b>60 bulan</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	12 bulan	12 bulan	100%

		<b>dan Ketertiban Umum</b>								
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah waktu terselenggaranya sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	60 bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	12 bulan	12 bulan	100%
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah waktu terselenggaranya harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	60 bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	12 bulan	12 bulan	100%
7.01.06	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Pemerintahan</b>	<b>81%</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>81%</b>	<b>81%</b>	<b>81%</b>
7.01.06.2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan</b>	<b>Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa</b>	<b>80 Fasilitasi</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>80 fasilitasi</b>	<b>80 fasilitasi</b>	<b>100%</b>
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Jumlah fasilitasi penyusunan peraturan desa	16 Fasilitasi	n/a	n/a	n/a	n/a	16 Fasilitasi	16 Fasilitasi	100%

		dan peraturan kepala desa								
7.01. 06.2. 01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan desa	16 Fasilitasi	n/a	n/a	n/a	n/a	16 Fasilitasi	16 Fasilitasi	100%
7.01. 06.2. 01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	Jumlah fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset	16 Fasilitasi	n/a	n/a	n/a	n/a	16 Fasilitasi	16 Fasilitasi	100%
7.01. 06.2. 01.09	Fasilitasi Singkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Jumlah fasilitasi Singkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	16 Fasilitasi	n/a	n/a	n/a	n/a	16 Fasilitasi	16 Fasilitasi	100%
7.01. 06.2. 01.09	Fasilitasi Penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah fasilitasi Penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	16 Fasilitasi	n/a	n/a	n/a	n/a	16 Fasilitasi	16 Fasilitasi	100%

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi perencana untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Capaian indikator kinerja Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto dibandingkan target pada Renstra periode 2021 – 2026 sudah cukup bagus, Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Dlanggu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2 (T-C. 30)  
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan  
Dlanggu Kabupaten Mojokerto

NO	Indikator	SPM/ Standart Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019 (n-3)	Tahun 2020 (n-2)	Tahun 2021 (n-1)	Tahun 2022 (n)	Tahun 2019 (n-3)	Tahun 2020 (n-2)	Tahun 2021 (n-1)	Tahun 2022 (n)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Kepuasan ASN terhadap layanan Kesekretariatan			n/a	79	80	80	n/a	79	80		baik
2	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan			n/a	79%	81%	81%	n/a	81%	81%		baik
3	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat			n/a	79%	81%	81%	n/a	80%	81%		baik
4	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			n/a	79%	81%	81%	n/a	80%	81%		baik

5	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Pemerintahan			n/a	79%	81%	81%	n/a	80%	81%		baik
6	Nilai reformasi birokrasi perangkat daerah						70,5				70,5	
7	IKM Pelayanan kecamatan						84				84	

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Isu-isu penting penyelenggaraan dan fungsi Kecamatan Dlanggu diantaranya dipengaruhi oleh kondisi internal dan lingkungan eksternal sebagai berikut :

#### **a. Kondisi Internal**

Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati untuk menangani sebagaimana urusan otonomi daerah yang meliputi aspek : Perjanjian, Rekomendasi, Koordinasi, Pembinaan , Pengawasan, Fasilitas, Penetapan, Penyelenggaraan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Kondisi internal terdiri dari 2 (dua) faktor strategis yaitu faktor kekuatan dan faktor kelemahan organisasi yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Kecamatan Dlanggu

##### **- Faktor Kekuatan Organisasi**

1. Adanya dukungan dana untuk biaya operasional dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang telah di tuangkan dalam Rencana Kerja Kecamatan Dlanggu;
2. Adanya dukungan teknologi informasi yang dapat mempercepat pelaksanaan tugas.

##### **- Faktor Kelemahan Organisasi**

1. Volume pekerjaan yang ada tidak ditunjang oleh ketersediaan jumlah aparatur kecamatan yang kurang mencukupi;
2. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan tugas;
3. Masih adanya aparatur yang kurang memahami teknologi informasi yang ada baik ditingkat Kecamatan maupun Desa.

#### **b. Lingkungan Eksternal**

Lingkungan eksternal terdiri atas dua faktor strategis karena berada pada lingkungan eksternal organisasi, maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Kecamatan Dlanggu namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi.

Dua faktor dari lingkungan eksternal organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi antara lain :

- Faktor Peluang Organisasi
  1. Kondisi wilayah Kecamatan Dlanggu yang subur, sehingga merupakan daerah yang prospektif untuk penyelenggaraan kegiatan pertanian, perikanan, perkebunan dan kegiatan lainnya;
  2. Kondisi masyarakat yang kondusif sehingga mendukung pelaksanaan pembangunan dalam segala bentuk.
- Faktor Tantangan Organisasi
  1. Masih tingginya keluhan masyarakat terhadap prosedur pelayanan publik;
  2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kondisi lingkungan;
  3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan;
  4. Infrastruktur jalan maupun drainase di tingkat Kecamatan maupun desa perlu diperbaiki;
  5. Sarana prasarana untuk fasilitas umum seperti sarana olah raga untuk masyarakat kurang.

Dengan adanya permasalahan dan hambatan yang ada, dan melihat kondisi masyarakat Kecamatan Dlanggu yang heterogen maka ini merupakan peluang dan tantangan bagi OPD Kecamatan Dlanggu untuk dapat meningkatkan pelayanan publik secara maksimal di tahun-tahun berikutnya.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.3 (T-C. 31)**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022**  
**Kabupaten Mojokerto**  
**Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Dlanggu**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot A	Kec. Dlanggu	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81	2.828.497.727	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Dlanggu	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,5	2.828.497.727	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Dlanggu	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	100%	23.500.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Dlanggu	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	100%	23.500.000	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Dlanggu	Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku	7 dokumen	8.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Dlanggu	Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku	7 dokumen	8.000.000	
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SIPD				8.000.000					8.000.000	
1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Dlanggu	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun	3 dokumen	7.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Dlanggu	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun	3 dokumen	7.500.000	

1.2	<b>Administrasi Keuangan perangkat daerah</b>	<b>Kec. Dlanggu</b>	<b>Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>2.488.093.247</b>	<b>Administrasi Keuangan</b>	<b>Kec. Dlanggu</b>	<b>Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>2.488.093.247</b>	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Dlanggu	Jumlah dokumen pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	28 dokumen	2.472.093.247	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Dlanggu	Jumlah dokumen pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	28 dokumen	2.472.093.247	
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Dlanggu	Jumlah laporan keuangan bulanan dan tahunan	38 laporan	16.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Dlanggu	Jumlah laporan keuangan bulanan dan tahunan	38 laporan	16.000.000	
1.3	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Dlanggu</b>	<b>IP ASN Perangkat Daerah</b>	<b>81</b>	<b>12.000.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Dlanggu</b>	<b>IP ASN Perangkat Daerah</b>	<b>81</b>	<b>12.000.000</b>	
1.3.1	Pangadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Dlanggu	Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS beserta perlengkapannya	20 stel	12.000.000	Pangadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Dlanggu	Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS beserta perlengkapannya	20 stel	12.000.000	
1.4	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Dlanggu</b>	<b>Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan</b>	<b>100%</b>	<b>159.691.000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Dlanggu</b>	<b>Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan</b>	<b>100%</b>	<b>159.691.000</b>	
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Dlanggu	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	10.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Dlanggu	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	10.000.000	
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Dlanggu	Jumlah Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan : Laptop, PC, Lcd, Printer, dll.	1 paket	51.500.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Dlanggu	Jumlah Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan : Laptop, PC, Lcd, Printer, dll.	1 paket	51.500.000	

1.4.3	Penyediaan Bahan Logistk Kantor	Kec. Dlanggu	Jumlah waktu penyediaan bahan logistikkantor	12 bulan	25.000.000	Penyediaan Bahan Logistk Kantor	Kec. Dlanggu	Jumlah waktu penyediaan bahan logistikkantor	12 bulan	25.000.000	
1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Dlanggu	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertaskop, amplop kop, lembar disposisi	1 paket	10.191.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Dlanggu	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertaskop, amplop kop, lembar disposisi	1 paket	10.191.000	
1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Dlanggu	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	377 bahan	3.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Dlanggu	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	377 bahan	3.000.000	
1.4.6	Penyediaan Bahan/Material	Kec. Dlanggu	Jumlah jenis ATK yang disediakan kertas, tinta, bolpoint, map dll	1 paket	41.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Kec. Dlanggu	Jumlah jenis ATK yang disediakan kertas, tinta, bolpoint, map dll	1 paket	41.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Dlanggu	Jumlah waktu penyediaan fasilitasi kunjungan tamu	12 bulan	-	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Dlanggu	Jumlah waktu penyediaan fasilitasi kunjungan tamu	12 bulan	-	
1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Dlanggu	Jumlah waktu pemenuhan biaya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	15.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Dlanggu	Jumlah waktu pemenuhan biaya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	15.000.000	
1.5	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kec. Dlanggu</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan</b>	<b>100%</b>	<b>70.213.480</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kec. Dlanggu</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan</b>	<b>100%</b>	<b>70.213.480</b>	

1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Dlanggu	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	30.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Dlanggu	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	30.000.000	
1.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Dlanggu	Jumlah tenaga kerja pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan	3 tenaga kerja	40.213.480	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Dlanggu	Jumlah tenaga kerja pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan	3 tenaga kerja	40.213.480	
1.6	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>Kec. Dlanggu</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</b>	<b>100%</b>	<b>75.000.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>Kec. Dlanggu</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</b>	<b>100%</b>	<b>75.000.000</b>	
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Dlanggu	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan penyediaan BBM, penggantian suku cadang dan pemeliharaan rutin lainnya dan pajak kendaraan	2 unit	30.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Dlanggu	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan penyediaan BBM, penggantian suku cadang dan pemeliharaan rutin lainnya dan pajak kendaraan	2 unit	30.000.000	
16.2	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Dlanggu	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	2 unit	30.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Dlanggu	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	2 unit	30.000.000	
1.6.3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kec. Dlanggu	Jumlah jenis pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	1 paket	15.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kec. Dlanggu	Jumlah jenis pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	1 paket	15.000.000	

2	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	Kec. Dlanggu	<b>Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan</b>	<b>81%</b>	<b>40.000.000</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	Kec. Dlanggu	<b>Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan</b>	<b>81%</b>	<b>40.000.000</b>	
2.1	<b>Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Kec. Dlanggu	<b>Jumlah Pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan minimal</b>	<b>560 pelayanan</b>	<b>40.000.000</b>	<b>Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Kec. Dlanggu	<b>Jumlah Pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan minimal</b>	<b>560 pelayanan</b>	<b>40.000.000</b>	
2.1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Dlanggu	Jumlah Pelayanan Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	30 pelayanan	5.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Dlanggu	Jumlah Pelayanan Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	30 pelayanan	5.000.000	
2.1.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Kec. Dlanggu	Jumlah Pelayanan Non Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	530 pelayanan	35.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Kec. Dlanggu	Jumlah Pelayanan Non Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	530 pelayanan	35.000.000	
3	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Kec. Dlanggu	<b>Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti</b>	<b>81%</b>	<b>340.000.000</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Kec. Dlanggu	<b>Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti</b>	<b>81%</b>	<b>340.000.000</b>	

3.1	<b>Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Kec. Dlanggu</b>	<b>Jumlah Fasilitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : pemerintahan, pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat</b>	<b>64 Fasilitas</b>	<b>340.000.000</b>	<b>Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Kec. Dlanggu</b>	<b>Jumlah Fasilitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : pemerintahan, pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat</b>	<b>64 Fasilitas</b>	<b>340.000.000</b>	
3.1.1	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Dlanggu	Jumlah fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16 fasilitas	60.000.000	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Dlanggu	Jumlah fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16 fasilitas	60.000.000	
3.1.2	Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Dlanggu	Jumlah Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	16 fasilitas	60.000.000	Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Dlanggu	Jumlah Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	16 fasilitas	60.000.000	
3.1.3	Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Dlanggu	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	16 fasilitas	80.000.000	Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Dlanggu	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	16 fasilitas	80.000.000	

3.1.4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Dlanggu	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	16 Fasilitasi	140.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Dlanggu	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	16 Fasilitasi	140.000.000	
<b>JUMLAH</b>					<b>3.208.497.727</b>	<b>JUMLAH</b>					<b>3.208.497.727</b>

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kecamatan merupakan sebuah OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam hal pelayanan publik sehingga hampir semua kegiatan selalu berhubungan langsung kepada masyarakat baik melalui pembinaan pemerintah desa, Lembaga, organisasi maupun masyarakat untuk dapat mewujudkan visi dan misi kabupaten Mojokerto yang diemban oleh Kecamatan khususnya misi ke 3 yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan serta optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah. Oleh sebab untuk menampung usulan dan kegiatan masyarakat yang ada dikecamatan Dlanggu melalui kegiatan Musrenbang desa dan Musrenbang Kecamatan, hasil dari dua kegiatan tersebut hanya berupa fisik prasarana, yang bentuk kegiatannya tidak dilakukan oleh Kecamatan Dlanggu secara langsung melainkan membantu untuk menampung dan menyampaikan kepada dinas terkait.

Tabel 2.4 (TC.32)  
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2022  
Kabupaten Mojokerto

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Dlanggu

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan berupa Hibah sapi kurban	Masjid Desa Ngembah	Jumlah Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 ekor	

Sebagai wujud tanggung jawab dari pelimpahan Hibah Sapi Kurban dari Bagian Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Dlanggu menerima satu usulan penerimaan Hibah Sapi Kurban dari Masjid Desa Ngembah. Guna menampung Hibah Sapi Kurban, maka diletakkan pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan. Sehingga pagu yang dibutuhkan untuk sub kegiatan tersebut menjadi 140.000.000 dibawah Seksi Kemasyarakatan

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Sesuai dengan arah kebijakan nasional untuk lebih meningkatkan pelayanan umum pada semua masyarakat di semua lapisan maka semua program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Dlanggu ditujukan untuk meningkatkan nilai indeks pelayanan masyarakat (IKM) Kecamatan.

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto adalah sebagai arah dan pedoman bagi upaya penjabaran penyelenggaraan OPD dalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, sehingga para pelaksana pembangunan daerah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pembangunan daerah.

Adapun tujuannya adalah agar pembangunan di Kabupaten Mojokerto sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan dilakukan secara terukur, terarah dan terpadu secara konsisten, agar berhasil sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan.

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran Organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi kriteria *specific, measurable, agresive but attainable, result oriented* dan *time bond*. Guna memenuhi kriteria tersebut, maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, atau disebut juga sebagai tolak ukur keberhasilan sasaran.

Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut, maka Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto menetapkan tujuan sebagai berikut : **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik**. Adapun sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya tata Kelola birokrasi perangkat daerah
2. Meningkatnya kualitas pelayanan public

Tabel T-C.25  
( Dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik		Nilai IKM	82	84	85	86	87	88
		Terwujudnya tata Kelola birokrasi perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	70	70,5	71	71,5	72	72,5
		Terwujudnya pelayanan publik yang optimal	Nilai indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	82	84	85	86	87	88

### 3.3 Program dan Kegiatan

Rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Dlanggu Tahun 2022 mengacu pada Tujuan Kecamatan Dlanggu yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Dlanggu Tahun 2021 – 2026 selama 5 tahun mendatang yaitu **Meningkatkan kualitas pelayanan publik**. Untuk itu Program dan kegiatan yang ada juga bertujuan untuk mewujudkan Pelayanan Publik yang optimal; yaitu antara lain :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:
  1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
    1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
  - Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
    1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

**Tabel 3.1 (T-C. 33)**

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022  
dan Perkiraan Maju Tahun 2023  
Kabupaten Mojokerto**

**Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Dlanggu**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Unsur Kewilayahan								
7.01	Kecamatan								
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kec. Dlanggu	80,5	2.828.497.727	APBD Kab		81	3.489.075.745
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	Kec. Dlanggu	10 dokumen	23.500.000	APBD Kab		10 dokumen	17.600.000

7.01.01. 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang dapat tersusun	Kec. Dlanggu	7 dokumen	8.000.000	APBD Kab		7 dokumen	8.800.000
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8.000.000				
7.01.01. 2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang dapat Tersusun	Kec. Dlanggu	3 dokumen	7.500.000	APBD Kab		3 dokumen	8.800.000
<b>7.01.01. 2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Dlanggu</b>	<b>64 Dokumen</b>	<b>2.488.093.247</b>	<b>APBD Kab</b>		<b>64 dokumen</b>	<b>3.113.53.0817</b>
7.01.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kec. Dlanggu	28 Dokumen	2.472.093.247	APBD Kab		28 dokumen	3.097.030.817
7.01.01. 2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah waktu penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kec. Dlanggu	38 laporan	16.000.000	APBD Kab		38 lapora n	16.500.000

<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>IP ASN Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Dlanggu</b>	<b>81</b>	<b>12.000.000</b>	<b>APBD Kab</b>		<b>81,5</b>	<b>13.200.000</b>
7.01.01.2.05.02	Pangadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas PNS serta perlengkapannya yang dapat terpenuhi	Kec. Dlanggu	20 stel	12.000.000	APBD Kab		20 stel	13.200.000
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan</b>	<b>Kec. Dlanggu</b>	<b>100%</b>	<b>159.691.000</b>	<b>APBD Kab</b>		<b>100%</b>	<b>185.010.100</b>
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan lampu, TL, saklar dll	Kec. Dlanggu	1 paket	10.000.000	APBD Kab		1 paket	11.000.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan : Komp, laptop, printer dll	Kec. Dlanggu	1 paket	51.500.000	APBD Kab		1 paket	83.600.000

7.01.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistk Kantor	Jumlah waktu Penyediaan makanan dan minuman	Kec. Dlanggu	12 bulan	25.000.000	APBD Kab		12 bulan	31.900.000
7.01.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi dan foto copi	Kec. Dlanggu	2 paket	10.191.000	APBD Kab		2 paket	11.210.100
7.01.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Kec. Dlanggu	1 Paket	3.000.000	APBD Kab		1 paket	3.300.000
7.01.01. 2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	jenis ATK yang disediakan : kertas, tinta , bolpoint, map dll	Kec. Dlanggu	1 paket	41.000.000	APBD Kab		1 paket	27.500.000
	Fasilitasi Kunjungan tamu	Jumlah waktu penyediaan fasilitas kunjungan tamu	Kec. Dlanggu	12 bulan	-	APBD Kab		-	-
7.01.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu pemenuhan biaya perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan	Kec. Dlanggu	12 bulan	15.000.000	APBD Kab		12 bulan	16.500.000

<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan</b>	<b>Kec. Dlanggu</b>	<b>100%</b>	<b>70.213.480</b>	<b>APBD Kab</b>		<b>100%</b>	<b>77.234.828</b>
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Dlanggu	12 bulan	30.000.000	APBD Kab		12 bulan	33.000.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa tenaga kerja selama 12 bulan	Kec. Dlanggu	3 tenaga kerja	40.213.480	APBD Kab		3 THL	44.234.828
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</b>	<b>Kec. Dlanggu</b>	<b>100%</b>	<b>75.000.000</b>	<b>APBD Kab</b>		<b>100%</b>	<b>82.500.000</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				30.000.000				
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Penyediaan BBM kendaraan operasional selama 12 bulan dan jumlah service serta penggantian suku cadang mobil dinas	Kec. Dlanggu	2 unit	-	APBD Kab		2 unit	33.000.000

7.01.01. 2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	Kec. Dlanggu	3 unit	30.000.000	APBD Kab		3 unit	33.000.000
7.01.01. 2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	Kec. Dlanggu	1 paket	15.000.000	APBD Kab		1 paket	16.500.000
7.01.02	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	<b>Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan</b>	<b>Kec. Dlanggu</b>	<b>81%</b>	<b>40.000.000</b>	<b>APBD Kab</b>		<b>81%</b>	<b>45.000.000</b>
7.01.02. 2.04	<b>Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Jumlah perijinan dan non perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan</b>	<b>Kec. Dlanggu</b>	<b>560 pelayanan</b>	<b>40.000.000</b>	<b>APBD Kab</b>		<b>560 pelayanan</b>	<b>45.000.000</b>
7.01.02. 2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelayanan Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	Kec. Dlanggu	30 pelayanan	5.000.000	APBD Kab		30 pelayanan	5.000.000

7.01.02. 2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah Pelayanan Non Perizinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Kec. Dlanggu	530 pelayanan	35.000.000	APBD Kab		530 pelayanan	40.000.000
<b>7.01.06</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti</b>	<b>Kec. Dlanggu</b>	<b>81%</b>	<b>340.000.000</b>	<b>APBD Kab</b>		<b>82%</b>	<b>360.000.000</b>
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</b>	<b>Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : pemerintahan, pembangunan, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat</b>	<b>Kec. Dlanggu</b>	<b>64 fasilitasi</b>	<b>340.000.000</b>	<b>APBD Kab</b>		<b>64 fasilitasi</b>	<b>360.000.000</b>
7.01.06. 2.01.02	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Kec. Dlanggu	16 fasilitasi	60.000.000	APBD Kab		16 fasilitasi	65.000.000

7.01.06. 2.01.03	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Jumlah fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Kec. Dlanggu	16 fasilitasi	60.000.000	APBD Kab		16 fasilitasi	65.000.000
7.01.06. 2.01.11	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kec. Dlanggu	16 Fasilitasi	80.000.000	APBD Kab		16 fasilitasi	80.000.000
7.01.06. 2.01.12	Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	Jumlah fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	Kec. Dlanggu	16 fasilitasi	140.000.000	APBD Kab		16 fasilitasi	150.000.000
<b>JUMLAH</b>					<b>3.208.497.727</b>				<b>3.894.075.745</b>

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana kerja (RENJA) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rangkaian rencana kerja diawali dengan melakukan pengelolaan perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Di dalam rencana kerja mengemukakan secara eksplisit rencana kerja program dan kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi kinerja perangkat daerah tahunan. Rencana Kerja dan pendanaan perangkat daerah mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan. Adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berpedoman pada Rentsra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Dalam penyusunan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah harus memperhatikan dan menganalisa rencana kerja beserta pendanaannya berdasarkan capaian kinerja yang telah di laksanakan. Di samping itu, Perangkat Daerah mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja pemerintah daerah melalui program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja serta target kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Organisasi. Hal ini mengingatkan rencana kerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, rencana yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan OPD, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja dan target kinerja program pembangunan OPD.

Secara rinci usulan program kegiatan dan Pendanaan Rencana Kerja Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto tahun 2022, dapat diuraikan sebagaimana tabel 4.1. berikut :

**Tabel 4.1**  
**REKAPITULASI DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2022**  
**KODE SKPD : 4.01.23**  
**NAMA SKPD : KECAMATAN DLANGGU**

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMDA / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	UP	B/L	INDIKATOR KINERJA				LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		APBN		
					OUTPUT SUB KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	OUTCOME PROGRAM	TARGET			SKPD Terkait	PAGU (Rp)	K/L	Rp	D/TB/ DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7	Unsur Kewilayahan													
	7.1	Kecamatan													
	7.1.1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>80,5</b>	Kec Dlanggu	<b>2.828.497.727</b>					
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		L		<b>Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target</b>		<b>100%</b>	Kec Dlanggu	<b>23.500.000</b>					
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		L	Jumlah dokumen yang dapat tersusun			7 dokumen	Kec Dlanggu	8.000.000					
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		L					Kec Dlanggu	8.000.000					
	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah		L	Jumlah dokumen yang dapat tersusun			3 dokumen	Kec Dlanggu	7.500.000					
	7.01.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		L		<b>Persentase realisasi anggaran perangkat daerah</b>		<b>100%</b>	Kec Dlanggu	<b>2.488.093.247</b>					

7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		L	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN			28 dokumen	Kec Dlanggu	2.472.093.247				
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		L	Jumlah penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN			38 laporan	Kec Dlanggu	16.000.000				
7.01.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		L		<b>IP ASN Perangkat Daerah</b>		<b>81</b>	Kec Dlanggu	<b>12.000.000</b>				
7.01.01.2.05.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		L	Jumlah pakaian dinas PNS serta perlengkapannya yg dapat terpenuhi			20 stel	Kec Dlanggu	12.000.000				
7.01.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		L		<b>Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan</b>		<b>100%</b>	Kec Dlanggu	<b>159.691.000</b>				
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		L	Jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan Lampu,TL, saklar dll			1 paket	Kec Dlanggu	10.000.000				
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		L	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan komp, Laptop, printer, dll.			1 paket	Kec Dlanggu	51.500.000				
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		L	Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman			12 bulan	Kec Dlanggu	25.000.000				

7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		L	Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan kertas, kop, amplop, kop, lembar disposisi			2 paket	Kec Dlanggu	10.191.000					
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		L	Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan			1 paket	Kec Dlanggu	3.000.000					
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material		L	Jenis ATK yang disediakan : kertas, tinta, bolpoin, map dll			1 paket	Kec Dlanggu	41.000.000					
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		L	Jumlah waktu penyediaan fasilitas kunjungan tamu			-	Kec Dlanggu	-					
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		L	Jumlah waktu pemenuhan biaya perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan			12 bulan	Kec Dlanggu	15.000.000					
7.01.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		L		<b>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan</b>		12 bulan	Kec Dlanggu	<b>70.213.480</b>					
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		L	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			3 tenaga kerja	Kec Dlanggu	30.000.000					
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		L	Jumlah penyediaan jasa tenaga kerja			3 THL	Kec Dlanggu	40.213.480					

					selama 12 bulan									
7.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		L			<b>Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</b>		2 Unit	Kec Dlanggu	<b>75.000.000</b>				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		L		Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara selama setahun									
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		L		Penyediaan BBM kendaraan operasional selama 12 Bulan dan jumlah service serta penggantian suku cadang mobil dinas			2 unit	Kec Dlanggu	30.000.000				
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		L		Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik			3 unit	Kec Dlanggu	30.000.000				
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		L		Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara dengan baik			1 paket	Kec Dlanggu	15.000.000				
7.1.2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		L					<b>84%</b>	Kec Dlanggu	<b>40.000.000</b>				
7.1.2.2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>		L			<b>Jumlah Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan</b>		<b>560 pelayanan</b>	Kec Dlanggu	<b>40.000.000</b>				
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan		L		Jumlah Pelayanan			30 pelayanan	Kec	5.000.000				

		Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan			Dlanggu						
7.01.02.2.04.02		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		L	Jumlah Pelayanan Non Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan		530 pelayanan	Kec Dlanggu	35.000.000					
7.1.6		<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>		L			<b>Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti</b>	<b>81%</b>	Kec Dlanggu	<b>340.000.000</b>				
7.1.6.2.01		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>		L		<b>Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat</b>		<b>64 fasilitasi</b>	Kec Dlanggu	<b>340.000.000</b>				
7.01.06.2.01.02		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		L	Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		16 fasilitasi	Kec Dlanggu	60.000.000					
7.01.06.2.01.09		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		L	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		16 fasilitasi	Kec Dlanggu	60.000.000					
7.01.06.2.01.11		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		L	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban		16 fasilitasi	Kec Dlanggu	80.000.000					

				Umum										
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		L	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan			16 fasilitasi	Kec Dlanggu	140.000.000					
JUMLAH ANGGARAN									<b>3.208.497.727</b>					

## BAB V PENUTUP

Rencana Kerja OPD kecamatan Dlanggu merupakan dasar pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (RENJA) untuk pelaksanaan kegiatan Kantor Kecamatan Dlanggu selama jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan tahun 2022, sebagai dasar dan referensi untuk menyusun action plan yaitu Rencana Kerja dan Anggaran OPD (RKA OPD) dalam rangka hal tersebut Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakankegiatannya untuk pencapaian sasaran program.

Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran (*budget intervention*), mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran / tanggung jawab / tugas yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum musyawarah koordinasi perencanaan, seperti Musrenbang di tingkat desa, Musrenbang di tingkat Kecamatan dan Musrenbang di tingkat Kabupaten.

Rencana Rencana Kerja Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto ini merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arahan, yang memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur. Selain itu, Rencana Kerja Kecamatan Dlanggu ini disusun sebagai suatu proses yang berkesinambungan, dalam penyusunannya sangat memerlukan data dan informasi yang akurat, sebagai bahan-bahan dalam penentuan kebijakan, sasaran, program dan kegiatan.

Mojokerto, September 2021

CAMAT DLANGGU



**NUNUK DJATMIKO, S.Sos, M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 196907011989031008